

Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Program Pembangunan Kehutanan dalam RPHJP di KPH Kayu Tangi

Muhamad Fariz Setiawan*, Muhammad Anshar Nur

Program Studi Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lambung Mangkurat
*farizsetyawan34@gmail.com

Abstract

The implementation of forestry development programs must be evaluated to achieve the targets that have been set during the forestry development implementation period. This study aims to determine the performance of forestry development and improvement strategies for implementing forestry development in the Long Term Forest Management Plan (LTFMP) in Forest Management Units (FMU). The data sources of this research are secondary data and primary data in the form of Tangi Timber Forest Management Unit (LTFMP) Long Term Management Plan (FMU) and interviews using a SWOT questionnaire. The data analysis technique used is program evaluation, namely comparing the plan with the realization of the implementation of forestry development and then analyzing with the Minister of Home Affairs Regulation No. 86 of 2017 to measure the performance interval in its implementation. And a SWOT analysis to determine strategies for improvement in the implementation of forestry development.

This study indicates that the implementation of the forestry development program results in a predicate or achievement in 8 (eight) programs selected based on what can be measured in general that the implementation is still not optimal, so an improvement strategy is needed in its implementation. And for the improvement strategy, it is found that the most appropriate according to the circumstances is the S-O strategy, which is to use strength to take advantage of opportunities so that they can make targeted improvement policies.

Keywords: Evaluation, Forestry development, Improvement Strategy, SWOT.

Abstrak

Pelaksanaan program pembangunan kehutanan harus dievaluasi guna untuk mencapai sasaran target yang telah ditetapkan selama periode pelaksanaan pembangunan kehutanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembangunan kehutanan dan strategi peningkatan untuk melaksanakan pembangunan kehutanan dalam Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Sumber data penelitian ini adalah data sekunder dan data primer yang berupa dokumen Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPHJP) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kayu Tangi serta wawancara dengan menggunakan kuisisioner SWOT. Teknik analisis data yang digunakan adalah evaluasi program yaitu membandingkan rencana dengan realisasi pelaksanaan pembangunan kehutanan kemudian dianalisis dengan kriteria Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 untuk mengukur interval kinerja dalam pelaksanaannya. Dan analisis SWOT untuk mengetahui strategi peningkatan dalam pelaksanaan pembangunan kehutanan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program pembangunan kehutanan mendapatkan hasil predikat atau capaian dalam 8 (delapan) program dipilih berdasarkan yang dapat diukur secara garis besar pelaksanaannya masih kurang maksimal

sehingga dibutuhkan strategi peningkatan kinerja dalam pelaksanaannya. Dan strategi peningkatan kinerja yang didapatkan adalah strategi prioritas S-O sehingga kebijakan peningkatan kinerja yang dibuat tepat sasaran.

Kata Kunci: Evaluasi, Pembangunan kehutanan, Strategi peningkatan, SWOT.

PENDAHULUAN

Pada dasarnya hutan memiliki kekayaan alam yang melimpah dan mempunyai fungsi dan manfaat dalam menyediakan berbagai macam kebutuhan serta keinginan makhluk hidup. Maka dari itu, hutan harus dilindungi dan dimanfaatkan sebaik mungkin sehingga tidak merusak ekosistem di dalamnya.

Untuk menjadikan keadaan hutan yang lebih baik, maka diperlukan proses perubahan secara terus menerus secara terpadu dan berkesinambungan yang didalamnya menyangkut kawasan hutan diartikan juga sebagai pembangunan kehutanan. Oleh karena itu, diperlukan organisasi pengelola hutan ditingkat terbawah yang mempunyai tenaga-tenaga teknis kehutanan agar hutan dapat dikelola secara efektif dan lestari dan diharapkan dapat mewujudkan pembangunan kehutanan dalam jangka panjang yang tidak mengabaikan serta merusak kekayaan alam dikawasan hutan lalu dibentuklah organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

Kemudian pada kegiatan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang yang disusun oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) mengikuti petunjuk teknis tata hutan dalam penyusunannya. Rencana program dan kegiatan juga realisasi pelaksanaannya maka akan dievaluasi dengan cara membandingkan antara rencana dan realisasi program. Fokus utama evaluasi diarahkan kepada hasil (outcomes) dari pelaksanaan rencana pembangunan kehutanan. Kemudian mencari strategi dalam meningkatkan kinerja pelaksanaan program pembangunan kehutanan. Dari latar belakang tersebut maka peneliti ingin membahas tentang Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Program Pembangunan Kehutanan Dalam RPHJP di KPH Kayu Tangi.

Berdasarkan uraian tersebut maka masalah yang akan diteliti di penelitian ini (1) Bagaimana evaluasi kinerja pelaksanaan program pembangunan kehutanan dalam RPHJP di KPH Kayu Tangi? (2) Bagaimana strategi peningkatan kinerja pelaksanaan program pembangunan kehutanan dalam RPHJP di KPH Kayu Tangi?

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk (1) Mengetahui evaluasi kinerja pelaksanaan program pembangunan kehutanan dalam RPHJP di KPH Kayu Tangi (2)

Mengetahui strategi peningkatan kinerja pelaksanaan program pembangunan kehutanan dalam RPHJP di KPH Kayu Tangi.

TINJAUAN PUSTAKA

Evaluasi

Evaluasi merupakan tujuan utama mengetahui seberapa jauh program dapat terlaksana dan tercapai dengan cara ilmiah untuk mendapatkan data menurut Sugiyono (2018).

Pembangunan Kehutanan

Untuk menjadikan keadaan hutan yang lebih baik, maka diperlukan proses perubahan secara terus menerus secara terpadu dan berkesinambungan yang didalamnya menyangkut kawasan hutan diartikan juga sebagai pembangunan kehutanan.

Strategi Peningkatan

Strategi adalah pelaksanaan perencanaan melalui pendekatan secara keseluruhan pada aktivitas dalam periode-periode waktu tertentu.

Strategi peningkatan bertujuan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program pembangunan kehutanan agar program dapat dilaksanakan dengan baik untuk mewujudkan visi dan misi dari Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

Dari Segi metode dan cara penyusunan strategi peningkatan pelaksanaan program, terdapat cara yang lazim digunakan, yaitu dengan menggunakan metode SWOT yang didasarkan pada aspek-aspek kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Kekuatan perumusan strategi peningkatan menggunakan SWOT adalah cara ini menghasilkan strategi sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang dihadapi oleh daerah bersangkutan.

Kriteria Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Tabel 1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber: *Permendagri No. 86 Tahun 2017*

Penelitian Terdahulu

Penelitian Ichsan dan Febryano (2015) dengan judul “Penilaian Kinerja Pembangunan, Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Rinjani Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat” menunjukkan hasil kemantapan Kawasan, rencana kelola dan mekanisme investasi dan sumberdaya manusia yang berkualitas dan memadai adalah hal-hal untuk menjamin operasionalisasi KPH yang perlu diperkuat dalam mewujudkan fungsinya sebagai unit pengelolaan hutan ditingkat terbawah agar tidak menghambat implementasi program yang telah direncanakan dalam RPHJP KPH Rinjani.

Penelitian Nandini (2013) dengan judul “Evaluasi Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (Hkm) Pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung Di Pulau Lombok” menunjukkan hasil Hutan Kemasyarakatan di hutan produksi mendapatkan skor 47,36 dan berada pada kondisi sedang. Kondisi biofisik dan tanaman merupakan faktor pembatas dalam aspek teknik, sistem pengelolaan kelembagaan merupakan faktor pembatas kelembagaan, dan potensi ekonomi Hutan Kemasyarakatan adalah faktor pembatas ekonominya.

Penelitian Cendrasari (2015) dengan judul “Evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat (Phbm) di Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Semarang (Studi Di Lmdh Sumber Rejeki)” menunjukkan hasil program yang dilaksanakan tidak semua dapat tercapai sesuai dengan tujuan PHBM, peran Perum Perhutani dan masyarakat sekitar hutan belum dapat mencapai tujuan PHBM dalam menjaga dan mengelola fungsi manfaat sumberdaya hutan yang ada faktor penghambatnya ialah belum adanya upaya yang dilakukan masyarakat dalam mengatasi gangguan keamanan hutan di LMDH Sumber Rejeki.

METODE PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian ini mengetahui kinerja pelaksanaan program pembangunan kehutanan dalam RPHJP di KPH Kayu Tangi, mengevaluasi kinerja pelaksanaan program pembangunan kehutanan dalam RPHJP di KPH Kayu Tangi dan Strategi peningkatan kinerja pelaksanaan program pembangunan kehutanan dalam RPHJP di KPH Kayu Tangi. Jenis penelitian ini menurut metode berupa penelitian evaluasi, menurut tingkat eksplanasi berupa komparatif dan Jenis data berupa data kualitatif dan kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Tempat atau lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Kesatuan Pengelolaan

Hutan (KPH) Kayu Tangi yang terletak di Kota Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan.

Definisi Operasional Variabel

Rencana Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

Adalah rencana yang disusun berdasarkan kondisi lingkungan dalam hal pengelolaan kawasan hutan agar lebih efektif dan lestari yang menyangkut rencana kehutanan, hasil tata hutan, aspirasi, peran dan nilai budaya masyarakat sekitar hutan. Variable ini dikhususkan untuk program dan kegiatan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun.

Realisasi Pelaksanaan Program Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)

Adalah program-program dalam Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang sudah terealisasi atau sudah terlaksana dalam pelaksanaan program pembangunan kehutanan.

Evaluasi Program

Adalah Evaluasi dilakukan dengan yaitu membandingkan program antara rencana dan realisasi atau yang sudah terlaksana dalam pelaksanaan pembangunan kehutanan, kemudian di analisis menggunakan kriteria Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Strategi Peningkatan

Menggunakan analisis SWOT untuk menentukan strategi peningkatan kinerja pelaksanaan program pembangunan kehutanan menggunakan RPHJP di KPH Kayu Tangi.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data menggunakan 3 (Tiga) cara yaitu dengan (1) dokumentasi teknik yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data melalui hasil publikasi yang dilakukan instansi-instansi baik dalam bentuk dokumen tertulis maupun elektronik, (2) wawancara dilakukan secara mendalam (Indept Interview) yang dilakukan ke Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kayu Tangi, (3) Kuisisioner metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau

pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Responden adalah orang yang menguasai atau mengetahui objek dalam penelitian ini yakni para *stakeholders*.

Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan yaitu evaluasi program data di evaluasi fokus diarahkan kepada hasil (*outcomes*) dari kinerja pelaksanaan program pembangunan kehutanan dalam Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP). Kemudian dianalisis dengan teknik analisis data menggunakan metode analisis Komparatif, yaitu membandingkan program antara rencana dan realisasi atau yang sudah terlaksana dalam kinerja pelaksanaan pembangunan kehutanan, kemudian di analisis menggunakan kriteria Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Dan Analisis SWOT bertujuan untuk melakukan evaluasi kondisi lingkup program bersangkutan sebagai strategi peningkatan kinerja program yang sesuai dan tepat. Evaluasi secara tajam dan terarah dalam hal melihat kondisi daerah tersebut merupakan kekuatan utama analisis SWOT.

HASIL DAN ANALISIS

Evaluasi Program

Tabel 2
Perbandingan Rencana dan Realisasi

No	Program	Rencana	Realisasi	Persenan (%)	Keterangan
1	Inventarisasi Berkala Wilayah Kelola Serta Penataan Hutan	160.832 ha	80.143 ha	83	Tinggi
2	Pemberdayaan Masyarakat	12 Kegiatan	10 Kegiatan	83	Tinggi
3	Pembinaan dan Pemantauan Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan pada Areal yang Berizin atau Areal KPH	8 Kegiatan	5 Kegiatan	66	Rendah
4	Rehabilitasi	84.000 batang	57.800 batang	83	Tinggi
5	Perlindungan dan Konservasi Alam	17 Kegiatan	15 Kegiatan	88	Tinggi
6	Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Antar Pemegang Izin	8 Kegiatan	5 Kegiatan	62	Rendah
7	Koordinasi dan Sinergi dengan Instansi dan <i>Stakeholder</i> Terkait	13 Kegiatan	13 Kegiatan	100	Sangat tinggi
8	Pembangunan Sarana dan Prasarana	7 Kegiatan	4 Kegiatan	57	Rendah

Sumber: data diolah dari data KPH Kayu Tangi

Berdasarkan tabel diatas, perhitungan evaluasi menggunakan perbandingan antara rencana dengan realisasi pelaksanaan program inventarisasi berkala wilayah kelola serta penataan hutan, capaian yang diperoleh adalah 83% (tinggi), ini menunjukkan bahwa pencapaian atau realisasi pelaksanaannya telah memenuhi target yang diharapkan.

Perhitungan evaluasi menggunakan perbandingan antara rencana dengan realisasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, capaian yang diperoleh adalah 83% (tinggi), ini menunjukkan bahwa pencapaian atau realisasi pelaksanaannya telah memenuhi target yang diharapkan. Perhitungan evaluasi menggunakan perbandingan antara rencana dengan realisasi pelaksanaan program pembinaan dan pemantauan pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan pada areal yang berizin atau areal KPH, capaian yang diperoleh adalah 66% (sedang), ini menunjukkan bahwa pencapaian atau realisasi pelaksanaannya capaian telah memenuhi target yang diharapkan, akan tetapi pelaksanaannya kurang maksimal dan masih dalam kategori sedang. Perhitungan evaluasi menggunakan perbandingan antara rencana dengan realisasi pelaksanaan program rehabilitasi, capaian yang diperoleh adalah 83% (tinggi), ini menunjukkan bahwa pencapaian atau realisasi pelaksanaannya telah memenuhi target yang diharapkan dan sudah maksimal dalam pelaksanaan. Perhitungan evaluasi menggunakan perbandingan antara rencana dengan realisasi pelaksanaan program perlindungan dan konservasi alam, capaian yang diperoleh adalah 88% (tinggi), ini menunjukkan bahwa pencapaian atau realisasi pelaksanaannya telah memenuhi target yang diharapkan dan sudah maksimal dalam pelaksanaan. Perhitungan evaluasi menggunakan perbandingan antara rencana dengan realisasi pelaksanaan program penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi antar pemegang izin, capaian yang diperoleh adalah 62% (rendah), ini menunjukkan bahwa pencapaian atau realisasi pelaksanaannya belum memenuhi atau masih dibawah target yang diharapkan sehingga tidak maksimal. Perhitungan evaluasi menggunakan perbandingan antara rencana dengan realisasi pelaksanaan program koordinasi dan sinergi dengan instansi dan *stakeholder* terkait, capaian yang diperoleh adalah 100% (sangat tinggi), ini menunjukkan bahwa pencapaian atau realisasi pelaksanaannya telah memenuhi target yang diharapkan dan sudah maksimal dalam pelaksanaan. Perhitungan evaluasi menggunakan perbandingan antara rencana dengan realisasi pelaksanaan program penyediaan sarana dan prasarana, capaian yang diperoleh adalah 57% (rendah), ini menunjukkan bahwa pencapaian atau realisasi pelaksanaannya belum memenuhi target yang diharapkan dan sehingga kurang maksimal.

Strategi Peningkatan

Analisis SWOT

Analisis SWOT bertujuan untuk melakukan evaluasi kondisi lingkup program bersangkutan sebagai strategi peningkatan kinerja program yang sesuai dan tepat. Evaluasi secara tajam dan terarah dalam hal melihat kondisi daerah tersebut merupakan kekuatan utama analisis SWOT, Dimana untuk menganalisis faktor strategis kinerja pelaksanaan pembangunan kehutanan menggunakan isu strategis dari Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan dan RPHJP KPH Kayu Tangi.

IFAS

Tabel 3
Analisis IFAS

No	Faktor Strategis Internal	Bobot	Skor	Nilai
A	Kekuatan (Strength)			
1	Komitmen pemerintah daerah dan pusat dalam pengelolaan hutan lestari masyarakat sejahtera	27	4	108
2	Luas areal kerja KPH Kayu Tangi yang besar terdiri dari hutan produksi dan lindung yang didalamnya kaya akan potensi HHK dan HHBK	26	4	104
3	Banyaknya potensi HHBK yang ada di wilayah kerja KPH Kayu Tangi seperti Kemiri, kayu manis, rotan, madu, karet rakyat dan jenis empon empon	25	4	100
4	Potensi Jasa Lingkungan antara lain air terjun yaitu Mandin Mangapan, Mandin Paninjauan, Mandin Pilung, Mandin Bainah, Arung Jeram Riam Bari	22	3	66
				378

Tabel 4
Analisis IFAS

No	Faktor Strategis Internal	Bobot	Skor	Nilai
B	Kelemahan (Weakness)			
1	Tata batas kawasan yang kurang mantap sehingga dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membangun pemukiman didalam kawasan hutan	15	3	45
2	Data base potensi hasil hutan baik itu hasil hutan kayu maupun non kayu belum lengkap dan menyeluruh di areal kerja KPH Kayu Tangi	17	3	51
3	Ketidakseimbangan antara luas wilayah kerja yang mencapai 160.832 ha dengan jumlah pegawai KPH Kayu Tangi 72 orang	25	4	100
4	Anggaran pengelolaan KPH Kayu Tangi masih tergantung dari anggaran pusat dan daerah	24	4	96
5	Ketersediaan sarana dan prasarana lapangan yang masih kurang memadai seperti belum memiliki bangunan kantor Resort Pengelolaan Hutan (RPH).	19	4	76
				368

EFAS

Tabel 5
Analisis EFAS

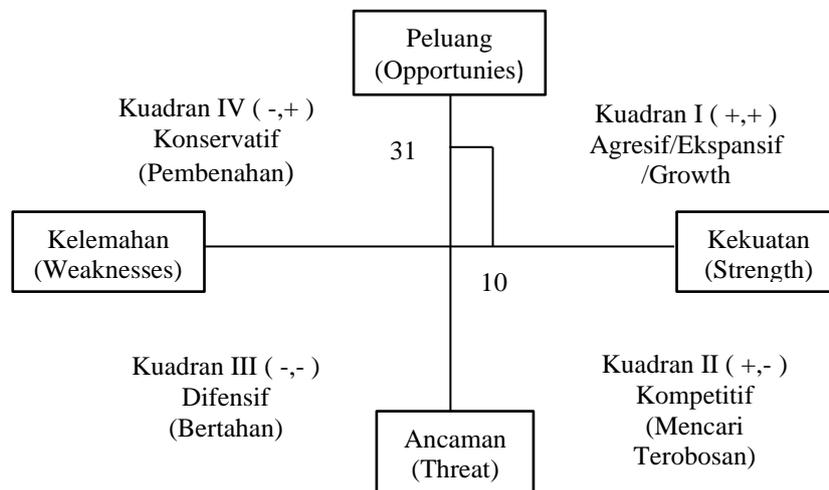
No	Faktor Strategis Eksternal	Bobot	Skor	Nilai
C	Peluang (Opportunities)			
1	Kebijakan pemerintah yang menempatkan KPH Sebagai pengelola kawasan ditingkat tapak	28	4	112
2	Secara bersama-sama dengan <i>stakeholder</i> terkait terutama dengan pemegang IUPPHK HTI dan masyarakat sekitar didalam kawasan untuk membangun dan melestarikan kawasan hutan	22	3	66
3	Tingginya permintaan hasil hutan kayu dan non kayu pada masa mendatang	24	4	96
4	Pengembangan dan peningkatan SDM KPH Kayu Tangi melalui Diklat	26	4	104
				378

Tabel 6
Analisis EFAS

No	Faktor Strategis Eksternal	Bobot	Skor	Nilai
D	Ancaman (Treats)			
1	Besarnya kebutuhan lahan hutan dalam sektor lain seperti perkebunan dan pertambangan	20	3	80
2	Besarnya pengakuan kepemilikan lahan pada kawasan hutan sehingga menimbulkan konflik	30	3	90
3	Banyaknya potensi HHK dan HHBK, namun terdapat keterbatasan pengelolaan karena kurangnya SDM dikarenakan luasnya wilayah yang dimiliki	27	4	108
4	Penjarahan terhadap hasil hutan kayu (illegal logging)	23	3	69
				347

Matrik SPACE

Gambar 1
Analisis Matrik SPACE



Dengan melakukan perhitungan melalui matrik SPACE maka akan terlihat kuadran yang berisi strategi sesuai dengan kondisi atau keadaan saat ini. Dari perhitungan dapat dilihat bahwa strategi peningkatan pelaksanaan pembangunan kehutanan masuk pada kuadran I yaitu agresif/ekspansif/growth yang strateginya bertujuan agar terus

tumbuh dengan strategi yang tepat adalah strategi S-O yaitu menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang.

Keterangan:

Sumbu X = Total Kekuatan – Total Kelemahan = 378 – 368 = 10

Sumbu Y = Total Peluang – Total Ancaman = 378 – 347 = 31

Strategi Prioritas dan Kebijakan Peningkatan

Strategi prioritas merupakan strategi yang paling tepat dengan keadaan sekarang yang dihitung melalui matrik SPACE, melalui matrik SPACE dapat diketahui strategi peningkatan kinerja pelaksanaan pembangunan kehutanan yang paling tepat adalah strategi Prioritas S-O.

1. Strategi Prioritas S-O
 - a. Memanfaatkan kebijakan pemerintah daerah dan pusat dalam menempatkan KPH sebagai pengelola kawasan ditingkat tapak guna melaksanakan pembangunan kehutanan.
 - b. Mengoptimalkan luas areal kerja KPH Kayu Tangi yang didalamnya kaya akan HHK dan HHBK Sehingga Sumber Daya Manusia yang ada diperlukan adanya pengembangan serta peningkatan melalui diklat.
2. Kebijakan Peningkatan
 - a. Peningkatan kinerja pelaksanaan program pembangunan kehutanan dengan adanya dukungan dari pemerintah daerah dan pusat agar tercapai visi KPH Kayu Tangi yang menjadikan KPH Mandiri.
 - b. Membangun kerja sama dengan *stakeholders* terkait terutama pemegang IUPPHK HTI dan masyarakat sekitar hutan untuk membantu membangun dan melestarikan kawasan hutan
 - c. Mengoptimalkan potensi HHK dan HHBK agar menjadi pendapatan penerimaan sehingga tidak lagi ketergantungan dengan anggaran pemerintah pusat dan daerah.
 - d. Program peningkatan kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) dengan kegiatan, yaitu penambahan pegawai KPH Kayu Tangi yang memiliki kualitas dan kapabilitas, peningkatan profesionalisme, peningkatan kerja sama tim, pembinaan dan peningkatan melalui Diklat.

PENUTUP

Implikasi Penelitian

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja dalam pelaksanaan program pembangunan kehutanan dalam Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kayu Tangi menunjukkan kinerja yang kurang maksimal sehingga diperlukan strategi dalam peningkatan kinerja pelaksanaan program pembangunan kehutanan. Strategi peningkatan yang didapat paling tepat sesuai keadaan adalah strategi Prioritas S-O, yaitu menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang sehingga dapat membuat kebijakan peningkatan yang tepat sasaran.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian evaluasi hanya menggunakan perbandingan antara rencana dan realisasi, tidak langsung melihat dan observasi ke lapangan dikarenakan pandemi Covid-19 yang datang tidak terduga dan pengumpulan data wawancara yang hanya dapat dilakukan ketika memasuki masa *New Normal*.

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa kinerja pelaksanaan program pembangunan kehutanan dalam Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kayu Tangi yang mempunyai 16 (enam belas) rencana program, kemudian dipilih sebanyak 8 (delapan) rencana program yang dapat diukur secara garis besar dan mendapat predikat capaian masing – masing, yaitu (1) Inventarisasi Berkala Wilayah Kelola Serta Penataan Hutan sebesar 83% (Tinggi), (2) Rencana Pemberdayaan Masyarakat sebesar 83% (Tinggi), (3) Rencana Pembinaan dan Pemantauan Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan pada Areal yang Berizin/Areal KPH sebesar 66% (Rendah), (4) Rencana Rehabilitasi 83% (Tinggi), (5) Rencana Perlindungan dan Konservasi Alam 88% (Tinggi), (6) Rencana Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Antar Pemegang Izin 62% (Sedang), (7) Koordinasi dan Sinergi dengan Instansi dan *Stakeholder* Terkait 100% (Sangat Tinggi), (8) Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana 57% (Rendah). Dan untuk strategi peningkatan kinerja menggunakan analisis SWOT yang penilaian diisi oleh para ahli atau *stakeholders* sehingga strategi paling tepat sesuai keadaan adalah strategi prioritas S-O yaitu memanfaatkan kebijakan pemerintah daerah dan pusat dalam menempatkan KPH sebagai pengelola kawasan ditingkat terbawah guna melaksanakan pembangunan

kehutanan dan mengoptimalkan luas areal kerja KPH Kayu Tangi yang didalamnya kaya akan Hasil Hutan Kayu (HHK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Sehingga Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada diperlukan adanya pengembangan serta peningkatan melalui diklat. Kemudian mendapatkan kebijakan peningkatan yang tepat, yaitu (1) Peningkatan kinerja pelaksanaan program pembangunan dengan adanya dukungan dari pemerintah daerah dan pusat agar tercapai visi KPH Kayu Tangi yang menjadikan KPH Mandiri (2) Membangun kerja sama dengan stakeholder terkait terutama pemegang IUPPHK HTI dan masyarakat sekitar hutan untuk membantu membangun dan melestarikan kawasan hutan (3) Mengoptimalkan potensi Hasil Hutan Kayu (HHK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) agar menjadi pendapatan penerimaan sehingga tidak lagi ketergantungan dengan anggaran pemerintah pusat dan daerah (4) Program peningkatan kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) dengan kegiatan, yaitu penambahan pegawai KPH Kayu Tangi yang memiliki kualitas dan kapabilitas, peningkatan profesionalisme, peningkatan kerja sama tim, pembinaan dan peningkatan melalui Diklat.

Saran

Saran yang dapat dikemukakan peneliti adalah (1) Kinerja dalam pelaksanaan program pembangunan kehutanan perlu ditingkatkan walaupun ada program yang sudah maksimal dalam pelaksanaannya, sehingga dalam pengelolaan hutan dapat lebih konsisten dan lebih baik lagi untuk kedepannya, (2) Dalam peningkatan kinerja pelaksanaan program pembangunan kehutanan dapat dilakukan kebijakan peningkatan yang sesuai dan tepat dengan kondisi yang ada. Seperti yang telah saya buat berdasarkan Analisis SWOT, (3) Penelitian yang akan datang diharapkan untuk menganalisis secara keseluruhan atau 8 program yang tidak dianalisis pada penelitian ini.

BIBLIOGRAPHY

- Andi, C. I., & Indra, G.F. (2015). *Penilaian Kinerja Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Rinjani Barat*. Bandar Lampung: Universitas Lampung. *Jurnal Hutan Tropis Volume 3(2)*
- Cendrasari, K., & Subowo, A. (2015). *Evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat (Phbm) di Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Semarang (Studi Di Lmdh Sumber Rejeki)*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Indonesia, R. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Republik Indonesia.

- KPH. (2018) *Dokumen Review Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Tahun 2015-2024*. Banjar: Kesatuan Pengelolaan Hutan Kayu Tangi.
- MENDAGRI. (2017). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah*. Jakarta: KEMENDAGRI.
- Nandini, & Ryzke. (2013). *Evaluasi Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (Hkm) Pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung Di Pulau Lombok*.
- Sugiyono, P. D. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, P.D. (2018). *Metode Penelitian Evaluasi (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi)*. Bandung: Alfabeta.